

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2023
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah merupakan acuan perencanaan Perangkat Daerah khususnya untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Perencanaan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Diharapkan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Rancangan Rencana Kerja (RENJA) tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan limpahan dan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin...

Tenggarong, 11 Agustus 2022

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Kutai Kartanegara,



Ir. H. Ahyani Fadianur Diani, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19660212 199403 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun	
Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
Perangkat Daerah	27
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	40
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	61
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	63
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	63
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	64
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
PERANGKAT DAERAH	65
BAB V PENUTUP	89

TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	15
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara	26
Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021	42
Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Kutai kartanegara	62
Tabel 2.6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 dan Prakiran Maju Tahun 2024	69



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Panji No. 70 Kelurahan Panji Telp. (0541) 661322. 664977

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : P-403/DIARPUS/SET.II/ 188.4 /02/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah, maka bagi setiap Instansi Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (RENJA) masing-masing SKPD.
 - b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencana Pembangunan Daerah perlu adanya perubahan sistematika dalam penyusunan dokumen perencanaan.
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tentang Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104)
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 090 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara (RPJMD) 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 yang selanjutnya disebut RENJA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan dokumen Perencanaan Tahun 2023.

Pasal 2

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 11 Pebruari 2022

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



Ir. H. Ahyani Fadianur Diani, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660212 199403 1 009

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

NOMOR P- /DIARPUS/SET.III/ 188.4 /02/2022

TANGGAL 11 Pebruari 2022

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
(RENJA) DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023**

1. Pengarah : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3. Ketua : Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Kasubag.
Penyusunan Program dan Keuangan
4. Anggota :
 1. Kabid Pengelolaan, Pelayanan & Pemanfaatan Kearsipan
 2. Kabid Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
 3. Kabid Pengembangan Perpustakaan & Pembudayaan Kegemaran Membaca
 4. Kabid Pengolahan, Layanan & Pelestrarian Bahan Perpustakaan
 4. Hj. Mariana, S.Sos
 5. Edwin, SE
 6. Andri Asfiansyah
 7. Nuryana

Kepala Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan



Ir. H. Ahyani Fadianur Diani, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19660212 199403 1 009

BAB I

PENDAHULUAN



Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagai yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk Periode 1 (satu) Tahun, yang memuat kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi Masyarakat. Penyusunan Rancangan Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara

substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagai yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk Periode 1 (satu) Tahun, yang memuat kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi Masyarakat. Penyusunan Rancangan Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 berdasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 090 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
15. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 24 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah dokumen perencanaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dilingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Tujuan :

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bertujuan :

- a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi

kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2023;

- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA), maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Rencana Kerja (RENJA).

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU



2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) suatu Perangkat Daerah adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan program atau kegiatan-kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang sah untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan kas dan catatan atas laporan keuangan.

Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tingkat Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2021 sebesar 48,81 % (sangat rendah) sedangkan target Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 sebesar Rp. 16.462.694.611,00- dan Realisasinya sebesar Rp. 14.064.048.585,00- atau sebesar 85,43 % (Tinggi), serta diproyeksi untuk realisasi capaian kinerja dan anggaran pada tahun 2022 dapat terealisasi 100 %.

Realisasi target capaian indikator sasaran renstra 'Meningkatnya Tata Kelola Arsip Daerah' tidak tercapai karena kurangnya informasi dalam menentukan target yang terlalu tinggi diawal tentang perubahan metode penilaian Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) sedangkan Realisasi Indikator Program Rasio pengunjung perpustakaan per tahun tidak mencapai target karena terjadinya Pandemi Covid 19 yang membuat Perpustakaan tutup sementara untuk pelayanan umum dan minimnya dukungan anggaran dan kegiatan Perlunya memaksimalkan untuk pencapaian target di tahun 2023.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Ada program/kegiatan yang realisasinya tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;

2. Tidak semua program/ kegiatan realisasinya telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan
3. Ada program/ kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah kerjasama, koordinasi dan konsolidasi antara semua pemangku kepentingan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yakni capaian indikator program kearsipan prosentase SKPD tentang tata kelola arsip perangkat daerah 46,21 % dan pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan sebesar 12,18 %.
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mempertahankan hasil capaian, perlu menjaga kerjasama yang baik serta selalu berkoordinasi dan berkonsolidasi.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra- PD s/d Tahun 2021
Kabupaten kutai kartanegara

Dinas Kearsipan dan Perpustakann

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2022)	
					Target Renja-PD tahun (2021)	Realisasi Renja - PD tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
02.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74,00 Nilai	67	69	68	99	70	205	2,77

2.23.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	72	Dokumen	12	12	12	100	12	36	0,50
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18	Dokumen	11	3	3	100	3	17	0,94
2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen	1	2	2	100	1	4	0,67
2.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dokumen	1	1	1	100	1	3	0,50
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24	Dokumen	4	3	3	100	4	11	0,46
2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18	Dokumen	3	4	4	100	3	10	0,56
2.23.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel</i>	30	Laporan	5	6	6	100	5	16	0,53

2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	570	Orang/Bulan	0	12	12	100	95	107	0,19
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	1	1	1	100	1	3	0,50
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	0	1	1	100	3	4	0,22
2.23.01.2.02.08	2.23.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6	Laporan	0	1	1	100	1	2	0,33
2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	6	Dokumen	1	1	1	100	1	3	0,50
2.23.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	6	Laporan	1	1	1	100	1	3	0,50
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	423	Dokumen	1	1	1	100	1	3	0,01
2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	650	Unit	0	0	0	0	130	130	0,20

2.23.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Inovasi	52	Inovasi	0	12	12	100	2	14	0,27
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Layanan	0	8	8	100	8	16	0,16
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	90	Jenis	0	30	12	40	15	27	0,30
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	320	Jenis	0	25	17	68	60	77	0,24
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	165	Jenis	30	25	25	100	31	86	0,52
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	411960	Lembar	20	25	5	20	82390	82415	0,20
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	29900	Eksemplar	7524	5000	5174	103	5580	18278	0,61
2.23.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang disediakan	6	jenis	1	1	1	100	1	3	0,50

2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	1224	Orang/Hari	20	100	218	218	200	438	0,36
2.23.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	9000	Berkas	25	2000	2000	100	1500	3525	0,39
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	12	12	12	100	12	36	3,00
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	720	Bulan	550	132	132	100	120	802	1,11
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	Bulan	132	216	158	73	12	302	4,19
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	72	Bulan	420	420	419	100	12	851	11,82
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	1133	Unit	100	100	100	100	218	418	0,37
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	24	Unit	0	4	4	100	4	8	0,33

2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	36 Unit	9	6	6	100	6	21	0,58
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1060 unit	0	4	4	100	206	210	0,20
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 Unit	0	3	3	100	2	5	0,38
02.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
02.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	46,98 Persen	0	0	0	0	26,44	26	0,56
2.23.02.2.01	<i>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan</i>	2,64 Persen	0	0	0	0	0,8	1	0,30
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kel yang dilayani Oleh Perpustakaan Keliling	185 Desa/Kel	18	18	18	100	36	72	0,39
		Jumlah Layanan Perpustakaan pada hari sabtu dan minggu	54 Jumlah Bulan	3	0	0	0	6	9	0,17

2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik dan Perpustakaan Digital	2 Aplikasi	2	0	0	0	2	4	2,00
		Jumlah Koleksi Buku Digital	32000 Eksemplar	1058	0	0	0	10000	11058	0,35
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Pustaka yang dikelola	46090 Eksemplar	46090	0	0	0	46090	0	0,00
		Jumlah Bahan Pustaka yang diadakan untuk perpustakaan keliling	46090 Eksemplar	0	0	0	0	600	600	0,01
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	6 Laporan	0	0	0	0	1	1	0,17
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga teknis Perpustakaan desa yang dibina	150 Orang	30	60	60	100	30	120	0,80
		Jumlah Pustakawan yang tersertifikasi	15 Orang	0	0	0	0	-	0	0,00
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Jumlah Fasilitas akreditasi Perpustakaan Khusus	8 Perpustakaan	0	0	0	0	-	0	0,00

2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Akreditasi Perpustakaan Sekolah	16 Perpustakaan	0	0	0	0	3	3	0,19
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengembangan Perpustakaan Umum Kabupaten yang diadakan	15 Unit	0	100	100	100	1	101	6,73
		Jumlah Fasilitas Akreditasi Perpustakaan Desa/ Kelurahan	5 Perpustakaan	0	0	0	0	1	1	0,20
2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Khas Daerah	1250 Eksemplar	0	0	0	0	250	250	0,20
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembudayaan Gemar Membaca	30 Kali	0	0	0	0	5	5	0,17
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	20 Kali per Kecamatan	0	0	0	0	2	2	0,10
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeliharaan Sarana Perpustakaan di tempat-tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8 Perpustakaan	0	3	3	100	1	4	0,50
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Penghargaan yang diberikan kepada Organisasi Gerakan Budaya Gemar Membaca	10 Penghargaan	0	0	0	0	2	2	0,20

2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah frekwensi (pelatihan) pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	18	Kali per Kecamatan		0	0	0	4	4	0,22
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah	Jumlah Duta Baca	15	Duta	0	0	0	0	3	3	0,20
02.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	100	Persen	0	0	0	0	40%	0	0,00
2.23.03.2.01	<i>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Naskah Kuno	25	Naskah	0	0	0	0	5	5	0,20
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah naskah yang dialih mediakan	25	Naskah	0	0	0	0	5	5	0,20
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah naskah	9	Naskah	0	0	0	0	1	1	0,11
2.23.03.2.02	<i>Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	1648	Eksemplar	0	0	0	0	300	300	0,18
2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara	1648	Eksemplar	0	0	0	0	300	300	0,18

2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara	1500	Eksemplar	0	0	0	0	300	300	0,20
02.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
02.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip yang dikelola	100	%	100	100	100	100	100	100	1,00
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola	68101	Berkas	59101	1000	1000	100	60.101	60101	0,88
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Aktif yang telah dibuatkan daftar	10137	Berkas	58	58	58	100	1.000	58	0,01
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip In Aktif yang telah dibuatkan daftar	57964	Berkas	0	1000	1000	100	1.000	2000	0,03
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang berhasil mengelola arsip dengan ketentuan	58	PD	0	58	58	100	20	78	1,34
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	24.500	Berkas	22000	500	500	100	22.500	45000	1,84

2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang diakuisisi	2.500	Berkas	500	500	500	100	500	1500	0,60
		Jumlah Arsip Statis yang diolah	2.500		500	500	16500	3300	500	17500	7,00
		Jumlah Arsip Statis yang dipreservasi	24.000		15782	16500	16500	100	22.000	54282	2,26
		Jumlah Akses Arsip Statis	24.500		15782	16500	16500	100	500	32782	1,34
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	58	OPD	0	0	0	0	58	58	1,00
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	10	Unit	0	0	0	0	10	58	5,80
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah Unit Kearsipan yang dibina	1800	Orang/Unit Kerja Kearsipan	0	58	58	100	58	58	0,03
02.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	100	Persen	0	0	0	0	50	58	0,58

2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan sesuai NSPK	5000	Berkas	0	0	0	0	1.000	50	0,01
2.24.03.2.01.01	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Dokumen Arsip	5000	Berkas	0	0	0	0	1000	1000	0,20
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	2100	Berkas	0	0	0	0	100	1000	0,48
2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Arsip	2100	Berkas	0	0	0	0	100	100	0,05
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah arsip yang diselamatkan sesuai dengan NSPK	5000	Berkas	0	0	0	0	1.000	100	0,02
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Arsip	2500	Berkas	0	0	0	0	500	1000	0,40
2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Arsip	2500	Berkas	0	0	0	0	500	500	0,20

2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang ditemukan yang telah dinyatakan hilang sesuai NSPK	2100	Berkas	0	0	0	0	100	500	0,24
2.24.03.2.04.02	penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Dokumen Arsip Yang Dialih mediakan	3500	Berkas	0	0	0	0	500	100	0,03
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	2500	Berkas	0	0	0	0	500	500	0,20
2.24.03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah Dokumen Arsip	2500	Berkas	0	0	0	0	500	500	0,20
02.24.04	PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan	100	Persen	0	0	0	0	100	500	5,00
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota	51	Izin	0	0	0	0	3	100	1,96
	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Dokumen izin	1	SOP	0	0	0	0	1	1	1,00
2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Dokumen izin	51	Izin	0	0	0	0	3	3	0,06

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Dalam konsep ini diperlukan indikator *Input* (masukan), *Output* (keluaran) dan *outcome* (hasil).

Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Indikator Masukan (*Input*), yaitu indikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun berupa teknologi dan informasi, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran;
- Indikator Keluaran (*Output*), yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik;
- Indikator Hasil (*Outcome*), yaitu indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Suatu kegiatan dinilai ekonomis bila sumber daya alam yang digunakan sebaik-baiknya sebagai input kegiatan. Sedangkan penggunaan *input* sebaiknya untuk mendapatkan *output* secara maksimal dinamakan efisien. Selanjutnya, Seberapa besar output akan menghasilkan *outcome* dinamakan efektif.

Penilaian seberapa besar nilai ekonomis dan nilai efisien suatu kegiatan dapat dilihat secara langsung atau jangka pendek, karena *output* merupakan hasil langsung dari suatu kegiatan. Namun sulit untuk menilai seberapa efektif suatu kegiatan karena efektifitas baru dapat dinilai pada jangka menengah yang membutuhkan beberapa tahun penelitian atau penilaian.

Ditambahkan lagi dengan seluruh program/kegiatan di tahun 2023 belum dapat diidentifikasi dikarenakan sedang berjalan dan seperti biasa tentunya sedikit ada perubahan-perubahan di pertengahan tahun. Melihat kondisi yang ada ini maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan hanya menjabarkan program kerja yang sedang berjalan atau dalam proses pengerjaan.

A. Analisis Kinerja Output

Berdasarkan data-data yang ada dan hasil kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu 6 (Enam) program dan 38 Kegiatan ditahun 2021 hasil realisasi keseluruhan diangka 85,43 %. Hal ini tentu merupakan proses pekerjaan yang sangat baik. Dalam hal ini pula tentunya program-program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nanti oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, sejalan dengan program pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD dan termaktud dalam RKPD di tahun 2022. diharapkan pula tentunya ada peningkatan dan perbaikan-perbaikan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil tersebut Evaluasi Kinerja dari kegiatan, bahwa semua PPTK telah berusaha maksimal dan berhasil dalam upaya merealisasikan target kinerja yang telah disepakati dalam DPA kegiatan di awal tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bersungguh-sungguh dalam upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Analisa Kinerja Keuangan

Analisa Kinerja keuangan dilakukan untuk melihat efesiensi realisasi penyerapan dana berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan. Analisa keuangan disini sama halnya dengan analisa kinerja output, artinya pengukuran serapan anggaran keuangan yang dituangkan dalam kegiatan belum dapat diketahui dengan jelas. Maka dalam hal ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mengambil perbandingan tahun sebelumnya.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator*)	SPM/ Stand ar Nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	6	7	8	8	10	10	12	12	13
1	Cakupan OPD yang menerapkan Sistem Kearsipan Secara baku		Penerapan Arsip Secara Baku Pada OPD	90				43,79				
2	Pertumbuhan Pengunjung Perpustakaan per Tahun		Pengunjung Perpustakaan	5,50				0,67				
3	Terwujudnya Perpustakaan sesuai standar nasional Perpustakaan dan berbasis inklusi sosial untuk memperkuat budaya literasi		Indeks pembangunan literasi masyarakat		13	14	15			14	15	
4	Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional		Tingkat Ketersediaan Arsip		80	85	90			85	90	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.3.1 Pencapaian Tingkat Kinerja Pelayanan

Dalam hal pencapaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, khususnya *Cakupan OPD yang menerapkan tata kelola arsip* terlihat dari target renstra Pemerintah Daerah dan kemudian dijabarkan dengan realisasi capaian dimana untuk tahun 2021 target renstra sebesar 90 realisasi capaian sebesar 43,79 dimana hal tersebut tidak memenuhi target renstra dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Untuk tahun 2022 sebesar 62,00 dan diharapkan realisasi untuk tahun 2023 bisa tercapai sesuai target dari Pemerintah Daerah.

Kemudian untuk Rasio Pengunjung Perpustakaan per Tahun memuat tingkat pelayanan dengan parameter pengunjung perpustakaan pada tahun 2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Artinya program kegiatan tercapai, hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan fasilitas perpustakaan yang lebih baik dari tahun berjalan seperti, *pembuatan kartu anggota, penelusuran buku dengan komputerisasi* dan efektifnya perpustakaan keliling.

Untuk proyeksi tahun 2022 dengan parameter pengunjung perpustakaan juga mengalami peningkatan,

disebabkan berkurangnya Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan pelayanan umum Perpustakaan dibuka kembali. Melihat dari kondisi yang ada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan meyakinkan adanya peningkatan yang lebih baik dari target yang ditentukan, dengan meningkatkan kinerja sumber daya manusia serta membuat inovasi-inovasi yang baru.

3.2.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

1) *Permasalahan Pokok Urusan Perpustakaan*

Rendahnya budaya baca masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan permasalahan pokok yang terjadi pada urusan Perpustakaan, hal ini disebabkan karena belum optimalnya kinerja pembinaan dan pengelolaan perpustakaan serta belum dilaksanakannya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno.

Adapun yang menjadi akar masalah pada urusan perpustakaan adalah sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya sarana dan parasaran sistem layanan inlist dan minimnya koleksi perpustakaan digital.
2. Belum terakreditasinya Perpustakaan Umum Kabupaten dan Perpustakaan Desa/Kelurahan.

3. Belum Tersedianya Koleksi Buku Khas Daerah/lokal konten
4. Minimnya Perpustakaan Sekolah Yang sesuai dengan SNP
5. Minimnya kompetensi tenaga perpustakaan dan belum tersertifikasinya pustakawan
6. Terbatasnya jangkauan layanan perpustakaan keliling
7. Belum terakreditasinya Perpustakaan Umum Kabupaten dan Perpustakaan Desa/Kelurahan
8. Minimnya Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan
9. Belum dilaksanakannya kegiatan promosi perpustakaan digital
10. Terbatasnya gedung, sarana dan prasarana perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan
11. Belum adanya Pemberian Penghargaan Kepada Gerakan Budaya Gemar Membaca
12. Belum dilaksanakannya kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
13. Belum dilaksanakannya kegiatan Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah
14. Belum tersedianya naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

15. Belum memiliki naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa.

2) ***Permasalahan Pokok Urusan Kearsipan***

Rendahnya predikat pengelolaan kearsipan Perangkat Daerah adalah merupakan permasalahan pokok pada urusan kearsipan, hal ini disebabkan karena belum optimalnya kinerja pengelolaan dan perizinan pengguna arsip serta belum optimalnya kinerja perlindungan dan penyelamatan arsip.

Adapun yang menjadi akar permasalahan pada urusan kearsipan adalah sebagai berikut :

1. Belum memiliki data persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip secara komprehensif
2. Belum memiliki data persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip secara komprehensif
3. Lemahnya pengawasan kearsipan
4. Belum memiliki data persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik secara komprehensif
5. Belum tersedianya sistem layanan kearsipan
6. Minimnya kompetensi pengelola kearsipan
7. belum dilaksanakan pemusnahan arsip dengan NSPK

8. Belum adanya kegiatan evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana sesuai NSPK
9. Belum dilaksanakannya kegiatan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai NSPK
10. Minimnya kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK
11. Minimnya kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK
12. Belum terlaksananya kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK
13. Belum tersedianya Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dengan NSPK.

3.2.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi

Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, capaian strategis program Nasional/Internasional, SPM dan SDGs.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 adalah mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang

Sejahtera dan Berbahagia, untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya;
3. Memperkuat pembangunan ekonomi yang berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif ;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan

Adapun Dinas Kearsipan dan Perpustakaan masuk pada misi :

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani

Dampak terhadap Capaian visi dan misi kepala Daerah, terhadap capaian Program Nasional :

1. Tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan/tokoh nasional;

2. Peningkatan gemar membaca;
3. Meningkatkan penataan dan penguatan organisasi kearsipan;
4. Penyelamatan, pengolahan, pelindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik;
5. Terselenggaranya Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
6. penyelamatan, pengolahan, pelindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik;
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas koleksi perpustakaan;
8. Peningkatan diversifikasi dan kualitas layanan perpustakaan berbasis TIK melalui perpustakaan digital.
9. Peningkatan kualitas dan kapasitas perpustakaan sebagai pusat sumber belajar;
10. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan

Tantangan adalah hal-hal yang dapat menghambat kepada keberhasilan Program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain :

- **Tantangan Penyelenggaraan Urusan Kearsipan :**

- Keterbukaan Informasi dalam rangka pelaksanaan *Good Governance* membutuhkan sarana teknologi yang memadai dan membutuhkan biaya yang besar, strategi jitu dengan skala prioritas yang tajam dan efektif;
- Belum ada Perangkat Daerah yang mempunyai unit kearsipan dimana hal tersebut berfungsi untuk mengelola arsip sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk sekarang ini belum memiliki Depot Arsip yang memadai untuk menyimpan seluruh arsip yang akan diserahkan oleh seluruh Perangkat Daerah ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai Lembaga Kearsipan Daerah;
- Dinamisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam segala bentuk peristiwa dan proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perlu

perekaman secara komprehensif dan pengelolaan yang baik sebagai upaya meningkatkan salah satu tugas yaitu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pusat rekam dan data sejarah Penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- Tantangan Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan :

- Penyelenggaraan perpustakaan diharapkan bukan saja menyediakan bahan bacaan dan sumber belajar tetapi juga sebagai pusat informasi politik, ekonomi, budaya dan semua informasi publik yang diberikan oleh Pemerintah sehingga semua aspek kehidupan dapat terekam dan tersaji untuk masyarakat yang membutuhkannya maka perlu dikondisikan agar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mampu melaksanakan ruang lingkup tugas tersebut;
- Informasi yang handal membutuhkan sarana teknologi yang memadai dan membutuhkan biaya yang besar, strategi jitu dengan skala prioritas yang tajam dan efektif memberikan manfaat yang besar bagi penyelenggaraan dan operasionalisasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
- Pengelolaan yang profesional dan konsep penyelenggaraan perpustakaan yang jitu dengan

layanan yang prima, harus dibangun dengan berbasis pengembangan kualitas SDM dan Teknologi Informasi sehingga mampu memberikan perimbangan layanan melalui media elektronik lainnya yang jasanya semakin menarik dan atraktif.

- Kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung dan belum diketahui kapan berakhirnya, hal ini merupakan tantangan yang sangat mempengaruhi kinerja layanan perpustakaan. Pengembangan perpustakaan digital merupakan solusi yang sangat tepat sebagai upaya menyediakan bahan bacaan untuk masyarakat.

Beberapa peluang yang akan mendukung kepada kelancaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

- Peluang Penyelenggaraan Urusan Kearsipan :

- Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik nomor 82 Tahun 2012 semakin mengukuhkan peranan/arti penting arsip dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan;

- Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta Kearsipan di dunia Internasional memberi ruang yang lebih luas dalam penerapan Teknologi dan Informasi dalam rangka penyelenggaraan Sistem dan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
- Ketersediaan arsip yang *autentik* dan *reliable* merupakan keharusan dalam akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menuju *Good Governance*.

- **Peluang Penyelenggaran Urusan Perpustakaan :**

- Paradigma global (Pola/Pandangan Umum) dalam penyelenggaraan informasi dan Ilmu Pengetahuan memberikan peluang bagi untuk melakukan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat Informasi, edukasi, penelitian, reservasi dan rekreasi secara profesional dan berkelanjutan dan harus berkembang berbasis Teknologi Informasi;
- Kewajiban mengembangkan minat baca, menyediakan Koleksi bacaan, memberikan bahan bacaan yang menjadi topik hangat dimasyarakat, dan melestarikan Budaya setempat (*local culture*) adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

- Perpustakaan sebagai Agen perubahan perlu memberikan ruang untuk aktualisasi dan apresiasi masyarakatnya serta memberikan sarana untuk aktivitas akademik seperti diskusi, seminar dan workshop dan kegiatan kultural lainnya.

2.3.5 Formulasi Isu – Isu Kearsipan dan Perpustakaan

1. Meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memerintahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk segera menyusun dan menetapkan empat pilar instrumen pengelolaan arsip dinamis berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia
2. Meminta Kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB untuk menyediakan formasi Arsiparis bagi kementrian/lembaga dan Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai dengan analisa kebutuhan beban kerja kearsipan di lingkungannya
3. Mendorong Pemerintah Daerah serta Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendukung penguatan kelembagaan, anggaran dan SDM Semua jenis perpustakaan agar peran dan fungsi perpustakaan dalam perbaikan kualitas pelayanan perpustakaan sebagai hak masyarakat semakin maksimal.

4. Mendorong seluruh pemangku kepentingan bidang perpustakaan agar penguatan literasi sebagai salah satu pilar peningkatan kualitas SDM Indonesia Kutai Kartanegara yang termaktub dalam RPJMN Tahun 2020-2024 agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memasukkan penguatan budaya literasi sebagai arah kebijakan dalam pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.
5. Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan revitalisasi dan pembangunan infrastruktur fasilitas layanan perpustakaan sebagai institusi layanan publik yang terbuka dan inklusif sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang didukung melalui skema pendanaan APBD setiap tahun.
6. Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap upaya penguatan budaya literasi masyarakat melalui pengembangan perpustakaan dan diseminasi bahan bacaan terapan dengan memanfaatkan TIK dan sarana dan prasarana lainnya secara luas, serta mendorong masyarakat terus melakukan gerakan sosial mendukung aktivitas pegiat literasi di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

7. Program dan Kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan harus mengarah pada upaya peningkatan literasi masyarakat dan tertib arsip di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kerangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara holistik, integratif dan spasial dengan tata kelola pemerintahan yang berbasis tertib arsip.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) 2023 tentu harus dengan tingkat analisa dan evaluasi yang komprehensif mulai dari *telaahan terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah tahun lalu dengan Renstra Pemerintah Daerah, model analisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu apa yang didapat sesuai dengan tupoksi Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi*, melihat dari interpretasi yang ada maka untuk mendukung Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2023 perlu membuat rancangan awal RKPD. Tentunya dalam penyusunan program kegiatan di tahun 2022, harus mengacu dari renstra yang ada ditambah dengan masukan dari masyarakat.

Terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 yang telah disusun, sudah melalui hasil telaahan yang komprehensif dari pemangku kepentingan di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				16.769.741.206	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				17.019.741.206	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kukar	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,00	14.319.741.206	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kukar	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,00	14.319.741.206	
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kukar	<i>Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	11	679.738.367	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kukar	<i>Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	11	679.738.367	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	73.738.367	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	73.738.367	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kukar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kukar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kukar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kukar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	256.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	256.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	250.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	250.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	5	11.852.786.629	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	5	11.852.786.629	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kukar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 orang/bulan	11.672.786.629	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kukar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 orang/bulan	11.672.786.629	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	80.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	80.000.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kukar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kukar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	50.000.000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kukar	<i>Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah</i>	<i>1</i>	22.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kukar	<i>Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah</i>	<i>1</i>	22.500.000	

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	22.500.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	22.500.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1	149.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1	149.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kukar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	130 Paket	104.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kukar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	130 Paket	104.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	45.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	45.000.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	518.194.374	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	518.194.374	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kukar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	22.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kukar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	22.500.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kukar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	124.057.054	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kukar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	124.057.054	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kukar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	31 Paket	36.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kukar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	31 Paket	36.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kukar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	82390 Paket	22.050.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kukar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	82390 Paket	22.050.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kukar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5580 Dokumen	23.814.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kukar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5580 Dokumen	23.814.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kukar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	19.773.320	Penyediaan Bahan/Material	Kukar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	19.773.320	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	180.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	180.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kukar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Dokumen	90.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kukar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Dokumen	90.000.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kukar	<i>Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</i>	12	967.521.836	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kukar	<i>Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</i>	12	967.521.836	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 Laporan	1.320.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 Laporan	1.320.000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	291.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	291.600.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	674.601.836	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	674.601.836	
7	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Kukar</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah</i>	<i>218</i>	130.000.000	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Kukar</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah</i>	<i>218</i>	130.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kukar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	40.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kukar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	40.500.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kukar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	40.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kukar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	40.000.000	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kukar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	206 Unit	22.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kukar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	206 Unit	22.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kukar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	27.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kukar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	27.000.000	
II	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kukar	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	32,08	2.130.000.000	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kukar	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	32,08	2.380.000.000	
8	<i>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kukar	<i>Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan</i>	1,26	<i>1.870.000.000</i>	<i>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kukar	<i>Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan</i>	1,26	<i>1.870.000.000</i>	
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	48 layanan	185.000.000	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	48 layanan	185.000.000	

	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kukar	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	2 layanan	1.110.000.000	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kukar	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	2 layanan	1.110.000.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kukar	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	46590 Eksemplar	100.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kukar	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	46590 Eksemplar	100.000.000	
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	

	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34 Orang	150.000.000	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34 Orang	150.000.000	
	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Kukar	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	3 Perpustakaan	25.000.000	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Kukar	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	3 Perpustakaan	25.000.000	
	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	2 Perpustakaan	75.000.000	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	2 Perpustakaan	75.000.000	

	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	100.000.000	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	100.000.000	
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	250 Eksemplar	75.000.000	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	250 Eksemplar	75.000.000	
9	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Pembudayaan Gemar Membaca	5	260.000.000	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Pembudayaan Gemar Membaca	5	510.000.000	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Kukar	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	2 Lokus	50.000.000	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Kukar	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	2 Lokus	50.000.000	
	Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	50.000.000	Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	300.000.000	Adanya penambahan pagu usulan pokok pikiran dari DPRD

	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kukar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	2 Orang	35.000.000	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kukar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	2 Orang	35.000.000	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kukar	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	4 Perpustakaan	75.000.000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kukar	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	4 Perpustakaan	75.000.000	
	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah	Kukar	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	3 Orang	50.000.000	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah	Kukar	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	3 Orang	50.000.000	
III	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	kukar	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	40%	320.000.000	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	kukar	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	40%	320.000.000	
10	<i>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kukar	Jumlah Naskah Kuno	5	180.000.000	<i>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kukar	Jumlah Naskah Kuno	5	180.000.000	
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Kukar	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5 Eksemplar	80.000.000	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Kukar	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5 Eksemplar	80.000.000	

	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kukar	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	2 Orang	100.000.000	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kukar	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	2 Orang	100.000.000	
11	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	300	140.000.000	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	300	140.000.000	
	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kukar	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	300 Eksemplar	90.000.000	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kukar	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	300 Eksemplar	90.000.000	
	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kukar	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	300 Eksemplar	50.000.000	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kukar	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	300 Eksemplar	50.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				1.375.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					1.375.000.000
IV	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kukar	Persentase arsip yang dikelola	100	800.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kukar	Persentase arsip yang dikelola	100	800.000.000	
12	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola	62101	450.000.000	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola	62101	450.000.000	

	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kukar	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1000 Berkas	75.000.000	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kukar	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1000 Berkas	75.000.000	
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kukar	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1000 Berkas	75.000.000	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kukar	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1000 Berkas	75.000.000	
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Laporan	300.000.000	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Laporan	300.000.000	
13	<i>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kukar	Jumlah Arsip Statis yang dikelola	23000	150.000.000	<i>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kukar	Jumlah Arsip Statis yang dikelola	23000	150.000.000	
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kukar	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	24000 Arsip	150.000.000	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kukar	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	24000 Arsip	150.000.000	
14	<i>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</i>	Kukar	persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	58	200.000.000	<i>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</i>	Kukar	persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	58	200.000.000	

	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	300 Laporan	200.000.000	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	300 Laporan	200.000.000	
V	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Kukar	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	65%	500.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Kukar	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	65%	500.000.000	
15	<i>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</i>	Kukar	Jumlah arsip yang dimusnahkan sesuai NSPK	1.000	100.000.000	<i>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</i>	Kukar	Jumlah arsip yang dimusnahkan sesuai NSPK	1.000	100.000.000	
	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kukar	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1000 Arsip	100.000.000	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kukar	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1000 Arsip	100.000.000	
16	<i>Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota</i>	Kukar	Jumlah arsip yang dimusnahkan Sesuai NSPK	500	75.000.000	<i>Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota</i>	Kukar	Jumlah arsip yang dimusnahkan Sesuai NSPK	500	75.000.000	

	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kukar	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	75.000.000	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kukar	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	75.000.000	
17	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kukar	Jumlah Arsip yang diselamatkan sesuai dengan NSPK	1000	150.000.000	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kukar	Jumlah Arsip yang diselamatkan dan diselamatkan sesuai dengan NSPK	1000	150.000.000	
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Daftar	75.000.000	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Daftar	75.000.000	

	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Arsip	75.000.000	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Arsip	75.000.000	
19	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media sesuai dengan NSPK	500	100.000.000	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media sesuai dengan NSPK	500 Arsip	100.000.000	
	penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kukar	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	500 Arsip	100.000.000	penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kukar	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	500 Arsip	100.000.000	

19	<i>Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang</i>	Kukar	Jumlah arsip Statis yang ditemukan yang telah dinyatakan hilang sesuai dengan NSPK	500	75.000.000	<i>Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang</i>	Kukar	Jumlah arsip Statis yang ditemukan yang telah dinyatakan hilang sesuai dengan NSPK	500	75.000.000	
	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Kukar	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	500 Arsip	75.000.000	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Kukar	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	500 Arsip	75.000.000	
VI	PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	Kukar	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan	100%	75.000.000	PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	Kukar	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan	100%	75.000.000	
20	<i>Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota</i>	Kukar	Jumlah izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota	12	75.000.000	<i>Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota</i>	Kukar	Jumlah izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota	12	75.000.000	
	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kukar	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	12 Arsip	75.000.000	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kukar	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	12 Arsip	75.000.000	
JUMLAH					18.144.741.206						18.394.741.206

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 terdapat Usulan Program/Kegiatan dari masyarakat Kelurahan/Desa melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Usulan program/kegiatan dari masyarakat meliputi Pembangunan tempat/gedung perpustakaan kelurahan/desa dan sarana prasarana Perpustakaan guna menunjang pendidikan dan kesejahteraan Masyarakat.

Pemenuhan usulan program/kegiatan masyarakat sangat penting sebagai upaya peningkatan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam mewujudkan masyarakat yang gemar membaca dan berbudaya baca.

Adapun usulan Musyawarah Renacana Pembangunan di Kecamatan terdiri dari 7 (tujuh) pembangunan tempat/gedung perpustakaan dan 5 (lima) sarana prasarana perpustakaan.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		<i>Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan</i>		
1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Desa Panca Jaya, Desa Loa Duri Ilir, Desa Kota Bangun III, Kelurahan Samboja Kuala, Kelurahan Handil Baru	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpustakaan	Belum Tersedianya sarana dan prasarana Perpustakaan
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Desa Kota Bangun III, Desa Kayu Batu, Desa Tanjung Limau, Desa Separi, Kelurahan Teluk Pemedas, Desa Bangun Rejo dan Desa Sebeban	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7 Perpustakaan	Belum adanya bangunan/gedung perpustakaan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH



3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional memberikan implikasi kepada Daerah untuk melaksanakan pendekatan baru dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah akan dilaksanakan dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sasaran agenda prioritas daerah. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Lembaga Kearsipan Daerah dan sebagai penyelenggara perpustakaan Daerah selalu berupaya untuk meningkatkan tata kelola kearsipan di daerah dan peningkatan budaya baca masyarakat.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam pengelolaan dan penataan kearsipan dalam gerakan nasional sadar tata arsip (GNSTA) telah menjadi inspirasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memprioritaskan pengelolaan dan penataan arsip daerah, sedangkan arah kebijakan dan prioritas

pembangunan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) dalam meningkatkan nilai budaya baca masyarakat melalui Gerakan Literasi untuk kesejahteraan telah memberi semangat untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyediakan bahan bacaan bagi masyarakat serta layanan literasi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan rumusan tujuan yang ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, sebagai berikut :

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
1	Terwujudnya Budaya Baca Masyarakat	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat
	Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan pada Perangkat Daerah	Persentase PD yang menerapkan pengelolaan arsip kategori B
	Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Tingkat ketersediaan arsip

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH



4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026, melalui pembangunan Perpustakaan dan kearsipan yang berkualitas dan pelaksanaan tugas - tugas lainnya dari Bupati. Pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan tersebut dilihat dari :

- A. adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur;
- B. adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, dan antar-fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah;
- C. adanya keterkaitan dan konsistensi antara Pembuat Kebijakan, Pengawasan (Auditor), pelaksanaan (Operator) dan Masyarakat Kalimantan Timur pada umumnya; serta
- D. integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra Perangkat Daerah. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMD 2021 - 2026.

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMD 2021 - 2026 dimana secara tidak langsung juga turut mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara.

Sesuai dengan Misi ke-1 yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2021 – 2026 yaitu **“Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani”** yang kemudian diturunkan dalam Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Budaya Baca Masyarakat
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan pada Perangkat Daerah

Berangkat dari rumusan tujuan tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021 - 2026, sebagai berikut :

1. Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat
2. Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 mencerminkan rencana kerja dan kegiatan dalam rangka mencapai misi tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada dasarnya Rencana Kerja tahun 2023 menguraikan perencanaan untuk

pencapaian target kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023. Target kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitas yang harus dicapai selama tahun 2023 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran strategis akan dijadikan parameter / tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi, misi serta sasaran dan pendanaan kegiatan maupun program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Adapun komponen program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah :

1. Terwujudnya Perpustakaan sesuai standar nasional Perpustakaan dan berbasis inklusi sosial untuk memperkuat budaya literasi

melalui :

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN dengan Kegiatan :

- Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO dengan kegiatan :

- Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota

- Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional melalui :

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP dengan Kegiatan :

- Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP dengan Kegiatan :

- Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
- Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
- Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
- Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota

- Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang.

PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP dengan kegiatan :

- Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota

Serta program penunjang yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun rincian Program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kutai Kartanegara tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				17.019.741.206	APBD			17.019.741.206
I	02:23:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kukar	71,00	14.319.741.206	APBD		72,00	14.319.741.206
1	2.23.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kukar	11	679.738.367	APBD		11	679.738.367
	2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kukar	2 Dokumen	73.738.367	APBD		3 Dokumen	73.738.367

	2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kukar	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
	2.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kukar	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
	2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kukar	4 Laporan	256.000.000	APBD		4 Laporan	256.000.000
	2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kukar	3 Laporan	250.000.000	APBD		3 Laporan	250.000.000

2	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Kukar	5	11.852.786.629	APBD		5	11.852.786.629
	2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kukar	95 orang/bulan	11.672.786.629	APBD		95 orang/bulan	11.672.786.629
	2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kukar	1 Laporan	50.000.000	APBD		1 Laporan	50.000.000
	2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kukar	3 Laporan	80.000.000	APBD		3 Laporan	80.000.000

	2.23.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kukar	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
3	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Kukar	1	22.500.000	APBD		1	22.500.000
	2.23.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kukar	1 Laporan	22.500.000	APBD		1 Laporan	22.500.000
4	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kukar	1	149.000.000	APBD		1	149.000.000
	2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kukar	130 Paket	104.000.000	APBD		130 Paket	104.000.000
	2.23.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kukar	12 Orang	45.000.000	APBD		12 Orang	45.000.000

5	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kukar	8	518.194.374	APBD		8	518.194.374
	2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kukar	15 Paket	22.500.000	APBD		15 Paket	22.500.000
	2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kukar	60 Paket	124.057.054	APBD		60 Paket	124.057.054
	2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kukar	31 Paket	36.000.000	APBD		31 Paket	36.000.000
	2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kukar	82390 Paket	22.050.000	APBD		82390 Paket	22.050.000
	2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kukar	5580 Dokumen	23.814.000	APBD		5580 Dokumen	23.814.000

	2.23.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kukar	1 Paket	19.773.320	APBD		1 Paket	19.773.320
	2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kukar	200 Laporan	180.000.000	APBD		200 Laporan	180.000.000
	2.23.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kukar	1500 Dokumen	90.000.000	APBD		1500 Dokumen	90.000.000
6	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kukar	12	967.521.836	APBD		12	967.521.836
	2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kukar	120 Laporan	1.320.000	APBD		120 Laporan	1.320.000
	2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kukar	12 Laporan	291.600.000	APBD		12 Laporan	291.600.000

	2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kukar	12 Laporan	674.601.836	APBD		12 Laporan	674.601.836
7	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Kukar	218	130.000.000	APBD		218	130.000.000
	2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kukar	4 Unit	40.500.000	APBD		4 Unit	40.500.000
	2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kukar	6 Unit	40.000.000	APBD		6 Unit	40.000.000
	2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kukar	206 Unit	22.500.000	APBD		206 Unit	22.500.000

	2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kukar	2 Unit	27.000.000	APBD		2 Unit	27.000.000
	02:23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				2.700.000.000	APBD			2.700.000.000
II	02:23:02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	Kukar	32,08	2.380.000.000	APBD		37,38	2.380.000.000
8	2.23.02.2.01	<i>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan</i>	Kukar	1,26	1.870.000.000	APBD		1,72	1.870.000.000
	2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Kukar	48 layanan	185.000.000	APBD		48 layanan	185.000.000

	2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Kukar	2 layanan	1.110.000.000	APBD		2 layanan	1.110.000.000
	2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Kukar	46590 Eksemplar	100.000.000	APBD		46590 Eksemplar	100.000.000
	2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000

	2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	34 Orang	150.000.000	APBD		34 Orang	150.000.000
	2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kukar	3 Perpustakaan	75.000.000	APBD		3 Perpustakaan	75.000.000
	2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kukar	2 Perpustakaan	25.000.000	APBD		2 Perpustakaan	25.000.000

	2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Kukar	1 Perpustakaan	100.000.000	APBD		1 Perpustakaan	100.000.000
	2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kukar	250 Eksemplar	75.000.000	APBD		250 Eksemplar	75.000.000
9	2.23.02.2.02	<i>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Pembudayaan Gemar Membaca	Kukar	5	510.000.000	APBD		5	510.000.000
	2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Kukar	2 Lokus	50.000.000	APBD		4 Lokus	50.000.000

	2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	1 Perpustakaan	300.000.000	APBD		1 Perpustakaan	300.000.000
	2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Kukar	2 Orang	35.000.000	APBD		2 Orang	35.000.000
	2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kukar	4 Perpustakaan	75.000.000	APBD		3 Perpustakaan	75.000.000
	2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Kukar	3 Orang	50.000.000	APBD		3 Orang	50.000.000

III	02:23:03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	kukar	40%	320.000.000	APBD		60%	320.000.000
10	2.23.03.2.01	<i>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Naskah Kuno	Kukar	5	180.000.000	APBD		5	180.000.000
	2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Kukar	5 Eksemplar	100.000.000	APBD		5 Eksemplar	100.000.000
	2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kukar	2 Orang	80.000.000	APBD		2 Orang	80.000.000

11	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Kukar	300	140.000.000	APBD		300	140.000.000
	2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Kukar	300 Eksemplar	90.000.000	APBD		300 Eksemplar	90.000.000
	2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	Kukar	300 Eksemplar	50.000.000	APBD		300 Eksemplar	50.000.000
	02:24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				1.375.000.000	APBD			1.375.000.000
IV	02:24:02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip yang dikelola	Kukar	100	800.000.000	APBD		100	800.000.000
12	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola	Kukar	62101	450.000.000	APBD		64101	450.000.000

	2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Kukar	1000 Berkas	75.000.000	APBD		1000 Berkas	75.000.000
	2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Kukar	1000 Berkas	75.000.000	APBD		1000 Berkas	75.000.000
	2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kukar	30 Laporan	300.000.000	APBD		40 Laporan	300.000.000
13	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang dikelola	Kukar	23.000	150.000.000	APBD		23.500	150.000.000
	2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Kukar	24000 Arsip	150.000.000	APBD		24000 Arsip	150.000.000
14	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Kukar	58	200.000.000	APBD		58	200.000.000

	2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	300 Laporan	200.000.000	APBD		300 Laporan	200.000.000
V	02:24:03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	Kukar	65%	500.000.000	APBD		80%	500.000.000
15	2.24.03.2.01	<i>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</i>	Jumlah arsip yang dimusnahkan sesuai NSPK	Kukar	1.000	100.000.000	APBD		1.000	100.000.000
	2.24.03.2.01.01	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kukar	1000 Arsip	100.000.000	APBD		1000 Arsip	100.000.000
16	2.24.03.2.02	<i>Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota</i>	Jumlah arsip yang dimusnahkan Sesuai NSPK	Kukar	500	75.000.000	APBD		500	75.000.000

	2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Kukar	500 Arsip	75.000.000	APBD		500 Berkas	75.000.000
17	2.24.03.2.03	<i>Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan</i>	Jumlah Arsip yang diselamatkan sesuai dengan NSPK	Kukar	1000	150.000.000	APBD		1000	150.000.000
	2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	500 Daftar	75.000.000	APBD		500 Daftar	75.000.000

	2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	500 Arsip	75.000.000	APBD		500 Arsip	75.000.000
18	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media sesuai dengan NSPK	Kukar	500	100.000.000	APBD		500	100.000.000
	2.24.03.2.04.02	penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kukar	500	100.000.000	APBD		500	100.000.000

19	2.24.03.2.05	<i>Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang</i>	Jumlah arsip Statis yang ditemukan yang telah dinyatakan hilang sesuai dengan NSPK	Kukar	500	75.000.000	APBD		500	75.000.000
	2.24.03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Kukar	500 Arsip	75.000.000	APBD		500 Berkas	75.000.000
VI	02:24:04	PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan	Kukar	100%	75.000.000	APBD		100%	75.000.000
20	2.24.04.2.01	<i>Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota</i>	Jumlah izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota	Kukar	12	75.000.000	APBD		12	75.000.000
	2.24.04.2.01.01	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kukar	12 Arsip	75.000.000	APBD		12 Arsip	75.000.000
JUMLAH						18.394.741.206				18.394.741.206

BAB V

PENUTUP



a. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran 2023 adalah kegiatan atau sub kegiatan yang mendukung digitalisasi layanan dibidang perpustakaan dan kearsipan. Selain sebagai upaya menghadapi pandemi yang belum diketahui kapan berakhirnya dan juga sebagai jawaban atas tuntutan zaman atas teknologi dan informasi sudah selayaknya jika digitalisasi layanan perpustakaan dan kearsipan harus segera diwujudkan. Tetapi jika ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan maka inovasi dan kreatifitas sangat diperlukan demi terwujudnya digitalisasi layanan perpustakaan dan kearsipan.

b. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 ini merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan,

program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

c. Rencana Tindak Lanjut

Dalam Dokumen Rancangan Akhir Renja Kerja (RENJA) Tahun 2023 ini terdapat analisis kebutuhan dana/anggaran yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan 6 (enam) program yang dijabarkan kedalam beberapa kegiatan/sub kegiatan. Baik output maupun outcome yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara selalu berada dalam koridor untuk mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan adanya rencana kerja yang terukur diharapkan target capaian indikator kinerja kunci Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 ini dapat tercapai. Dalam pencapaian target juga harus didukung penuh dengan dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan Kearsipan Daerah dan Gerakan Budaya Baca Masyarakat serta menciptakan *Good Governance* di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 11 Agustus 2022

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Kutai Kartanegara



Ir. Ahyani Fadianur Diani, MM

NIP. 19660212 199403 1 009